**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pengertian Peranan**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebagai kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang di pilih. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa peran memiliki berbagai definisi. Peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.  Selain itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Dalam teorinya **Biddle dan Thomas,** yang dikutip oleh **Sarwono** dalam bukunya **Teori-Teori Psikologi Sosial (2004:21)** mengatakan bahwa:

**Peran serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.**

**Biddle dan Thomas** seperti dikutip **Sarwaono** membagi peristilahan teori dalam empat golongan, yaitu:

1. **Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial**
2. **Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut**
3. **Kedudukan orang-orang yang berprilaku**
4. **Kaitan antara orang dan perilaku**

Jadi peran adalah seperangkat tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu peristiwa atau keadaan yang sedang terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan peran:

**1. Subjek dan Target**

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

1. Subjek (perilaku); yaitu orang yang sedanga berperilaku menuruti suatu peran tertentu.
2. Taget (sasaran); yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan actor dan perilakunya

Aktor maupun target dapat berupa individu maupun kelompok yang saling berhubungan. Secord dan Backman menyatakan bahwa aktor menempati posisi pusat *(focal position)*, sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut *(counter position).* Dengan demikian aktor dan target merupakan partner dalam melakukan suatu peran.

**2. Perilaku**

Menurut **Biddle dan Thomas** seperti dikutip oleh **Sarwono** ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

***a. Expection* (harapan); adalah harapan-harapan orang pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas ditunjukan oleh seorang yang mempunyai peran tertentu.**

***b. Norm* (norma); adalah salah satu bentuk harapan yang menyertai suatu peran dana merupakan suatu tuntutan peran (role demand). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.**

***c. Performance* (wujud perilaku); adalah perwujudan perilaku secara nyata dalam suatu peran oleh aktor kepada target sasaran.**

***d. Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi); adalah segala sesuatu yang didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma tersebut, orang memberikan penilaian berupa kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan nilai positif agar perwujudan perilaku dalam peran diubah sedemikian rupa sesuai dengan harapan dan norma di masyarakat.**

Dengan demikian *expection* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi) saling berkaitan dalam perilaku peran. Harapan dan norma merupakan segala sesuatu yang berisi harapan atau keinginan masyarakat tentang perilaku yang menyertai suatu peran. Kemudian muncullah wujud perilaku sebagai realisasi dari harapan dan norma tersebut. Sehingga timbullah penilaian dan sanksi terhadap perilaku yang telah diwujudkan tersebut.

**3. Kedudukan orang yang berperilaku**

Secord & Backman dan Biddle & Thomas memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi). Dari ke-dua definisi mereka dapat disimpulkan tentnag kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka memiliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

Dengan demikian ada 3 (tiga) faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu. Pertama, sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, maka semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu. Ke dua adalah perilaku yang sama seperti penjahat, olahragawan, pemimpin, dan sebagainya. Ke tiga adalah reaksi orang lain terhadap mereka.

**4. Kaitan antara Orang dan Perilaku**

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut adalah sebagai berikut:

* 1. Derajat kesamaan atau ketidak samaan antara bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut. Derajat kesamaan memiliki kriteria yang disebut konsesus yang berarti kaitan antara perilaku-perilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Contoh: semua orang setuju bahwa ayah harus mengayomi anak-anaknya. Sedangkan derajat ketidaksamaan disebut disensus. Ada 2 (dua) disensus menurut Biddle dan Thomas. Pertama, disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Contoh: ada beberapa murid yang berpendapat wali kelas mereka terlalu disiplin, dan ada yang menilai wali kelas tersebut kurang sabar, dan sebagainya. Kedua, disensus yang terpolarisasi, yaitu ada dua pendapat yang saling bertentangan. Contoh: sebagian murid di kelas itu menilai wali kelasnya negatif karena terlalu ketat, sedangkan sebagian murid yang lain menilai wali kelasnya positif karena disiplin.
  2. Derajat saling menetukan atau saling ketergantungan antara bagian-bagian tersebut. Di sini suatu hubungan orang-perilaku akan memengaruhi, menyebabkan atau menghambat hubungan orang-perilaku yang lain. Misalnya perilaku ayah akan memengaruhi perilaku anak.
  3. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan. Hal ini terdiri atas konformitas, penyesuaian, dan kecermatan. Konformitas *(conformity)* adalah kesesuaian antara perilaku seseorang dengan perilaku orang-orang lain, atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Sedangkan penyesuaian *(adjustment)* adalah perbedaan perilaku seseorang dengan yang diharapkan orang lain, sehingga butuh penyesuaian perilakunya sesuai dengan harapan orang lain. Kemudian kecermatan *(accuracy)* yaitu ketepatan penggambaran suatu peran. Deskripsi peran yang cermat adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan peran itu, dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh orang yang memegang peran itu.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception.* **Soekanto** dalam bukunya **Sosiologi Suatu Pengantar** **(2004:239-240)**, menjelaskan bahwa:

**Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Peranan adalah suatu aspek interaksi sosial dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam badan hukum menjadi aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukanya.**

Jadi, jika seseorang atau kelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang dibebankan kepadanya. Peran dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika ia dipisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewjiban.

**Horton dan Hunt** dalam bukunya **Sosiologi (1996:118)** mengungkapkan **peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status**. Lebih lanjut lagi dikatakan:

**Peran (role) merupakan perilaku yang diiharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau kelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.**

Kedudukan (status) dan peranan (role) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti pentting dalam sistem sosial. Sisitem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya dan tingkah laku individu-individu tersebut. **Soekanto** dalam buku **Sosiologi Suatu Pengantar (2004:243),** peranan adalah:

**Peranan(role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya maka dia menjalankan suatu peranan.**

Seseorang memiliki kedudukan (status) dan melaksanakan peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan atas kedudukan atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Menurut **Levinson** yang dikutip dari **Soekanto** dalam buku **Sosiologi Suatu Pengantar (2004:244)**, peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

1. **Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Pernan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.**
2. **Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.**
3. **Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.**

Sejalan dengan hal tersebut **J. Levi** yang dikutip oleh **Soekanto** dalam buku **Sosiologi Suatu Pengantar (2004:246)** mengungkapkan bahwa pembahasan perihal macam-macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsunganya.**
2. **Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakanya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakanya.**
3. **Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.**
4. **Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlhihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.**

Dari uraian di atas bahwa peranan (role) merupakan suatu sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

**2.2 Pemerintah**

Berbicara tentang pemerintah berarti menyangkut tugas dan wewenang. Selain dalam pemerintah seringkali harus menyinggung Negara dan sistem politik. Sebab, baik dalam studi Negara maupun kajian sistem politik, pemerintah merupakan elemen wajib dan bagian dari struktur politik masyarakat/rakyat. Dalam hal ini pemerintah dalam arti sempit ditegaskan kembali oleh **Affandi** dalam bukunya **Ilmu-ilmu Kenegaraan-Suatu Studi Perbandingan****(1982:201)***,* yaitu :

**Suatu organisasi teknis yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan pelaksanaan segala urusan tersebut*.***

Selanjutnya pemerintah dalam arti yang luas menurut **Affandi** dalam bukunya ***Ilmu-ilmu Kenegaraan-Suatu Studi Perbandingan*****(1982:203)** adalah:

**Mencakup semua badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat sampai ke tingakat daerah. Jadi, merupakan keseluruhan dari semua organisasi di dalam Negara yang menjalankan kekuasaan Negara, merupakan gabungan dari organ-organ dan mekanisme legislatif, yudisial dan administrasi yang melaksanakan segala fungsi dan tugas Negara.**

Menurut **Affandi** dalam bukunya **Ilmu-ilmu Kenegaraan-Suatu Studi Perbandingan****(1982:203)** membedakan pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

**Pemerintah diartikan sebagai lembaganya atau badanya, yaitu organ Negara yang melakukan pemerintahan, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan tugasnya, fungsinya atau aktivitasnya yang dilakukan oleh pemerintah.**

Berdasarkan pada pengertian pemerintah, maka pemerintahan-pun memilki pengertian yang luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti sempit adalah pelaksanaan fungsi eksekutif, yaitu pelaksana dari pengaturan perundang-undangan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti yang luas berarti pelaksanaan dari fungsi badan legislative, eksekutif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut **Wilson** mengenai pemerintah yang dikutip oleh **Kencana** dalam buku **Pengantar Ilmu Pemerintahan (2001:23)** berpendapat bahwa :

**Pemerintah adalah pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan oganisasi kekuatan angkatan bersenjata, ttapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat.**

Menurut **Apter** mengenai pemerintah yang dikutip oleh **Kencana** dalam buku **Pengantar Ilmu Pemerintahan (2001:23)** menyatakan bahwa:

**Pemerintah adalah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tangggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian monopoli praktisi mengenai kekuasaan paksaan.**

Menurut **W.S Sayre** yang dikutip oleh **Situmorang** dalam buku **Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (1999:20)** pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah:

**Sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya. Secara etimologis, yaitu bahwa istilah pemerintah asal kata dari perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan :**

1. **Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara/badan tertinggi yang memerintah sesutau Negara seperti cabinet merupakan suatu pemerintah. Pemerintah yakni kata nama subyek yang berdiri sendiri.**
2. **Pemerintahan dilihat dari segi tata bahasa merupakan kata jadian yang oleh karena subyek mendapatkan akhira-an. Artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai dengan pemerintahan yakni perbuatan memerintah.**

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pemerintah adalah lembaga/badan organisiasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan memerintah masyarakat dalam suatu Negara. Lembaga/badan organisasi tersebut masing-masing memiliki fungsi legislatif, eksekutif serta yudikatif. Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dikatakan pemerinitahan, yaitu merpakan kegiatan atau cara dari perbuatan memerintah yang dalam hal ini dititikberatkan dalam konteks kenegaraan maupun pengaturan bagaimana suatu masyarakat itu diperintah.

**2.3 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Menurut **Carlzon dan Macauley** sebagaimana di kutip oleh **Wasistiono** dalam buku **Pemberdayaan Masyarakat (1998:46)** mengemukakan bahwa yang dimaksuh dengan pemberdayaan adalah sebagi berikut :

**Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakanya.**

Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupun pengetahuan (knowledge). Konsep pemberdayaan dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian yang disajikan dalam beberapa catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyrakat perlu dipahami. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat. Namun pemberdayaan hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, baliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan koaktualisasi aksestensi manusia.

Menurut **Prijono dan Pranaka** dalam **buku Pemberdayaan konsep, kebijakan dan implementasi (1996: 2-8)** menyatakan bahwa:

**Pada intinya pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkunganya.**

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Menurut **Sulistiyanti** dalam bukunya **Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan (2004:82-83),** tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

**1)Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.**

**2)Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.**

**3)Tahap peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehantarkan pada kemandirian.**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

**2.4 Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, menurut **Labolo** dalam buku **Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya**, **(2010:32)** peran pemerintah antara lain :

**1.    Pemerintah sebagai regulator**

**Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.**

**2.    Pemerintah sebagai dinamisator**

**Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif  dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.**

**3.    Pemerintah sebagai fasilitator**

**Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.**

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan, menurut **Labolo** dalam buku **Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya**, **(2010:32)** membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu:

1. **Pelayanan (public service)**
2. **Pembangunan (development)**
3. **Pemberdayaan (empowering)**
4. **Pengaturan (regulation)**

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang meciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. **Ndraha** dalam buku **Metodologi Ilmu Pemerintahan (2001 : 85)**, membagi menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

**1. Fungsi Primer**

**Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah.**

**2. Fungsi Sekunder**

**Fungsi sekunder berhububgan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari rowing (pengaturan) ke steering (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.**

Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

**Prawirokusumo** dalam buku ***Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)* (1999)** mengemukakan beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam pemberdayaan UKM:

**(a) kebijakan persaingan sehat dengan pengurangan distorsi pasar, (b) kebijakan ekonomi yang memberi peluang UKM dapat mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengar proses produksi, dan (c) kebijakan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan. Selanjutnya dukungan penguatan yang meliputi: peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM; peningkatan penguasaan teknologi; peningkatan penguasaai informasi; peningkatan penguasaan permodalan; peningkatan penguasaan pasar, pengoptimalan organisasi dan manajemen; pencadangan tempat usaha ; dan pencadangan bidang-bidang usaha.**

Pemerintah daerah dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal.

Peran yang dijalankan pemerintah dalam hal pemberdayaan UKM khusunya Sentra Rajuti zbinong Jati di Kota Bandung tidak terlepas dari pembagian kerja yang cermat dan sesuai dengan kemampuan atau *the right man on teh right job*, yang di lakukan SKPD yang bersangkutan dilapangan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun kesalahpahaman antar SKPD, Menurut **Hasibuan** (2007:33) ***pembagian kerja*** adalah yaitu merupakan informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Pembagian kerja menurut **Hasibuan** harus menguraikan berbagai hal sebagai berikut yaitu:

* ***Identifikasi pekerjaan***, yaitu memberikan nama jabatan.
* ***Hubungan tugas dan tanggung jawab,*** yaitu perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui.
* ***Standar wewenang dan pekerjaan,*** yaitu kewenangan dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas.
* ***Syarat kerja harus diuraikan secara jelas.***
* ***Ringkasan pekerjaan atau jabatan,*** hendaknya menguraikan bentuk umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan tugas utamanya.
* ***Penjelasan tugas dibawah dan diatasnya,*** yakni harus dijelaskan jabatan darimana petugas dipromosikan dan ke jabatan mana petugas akan dipromosikan.

2.5  Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut **Undang-Undang UKM Nomor 20 Tahun 2008** definisi UMKM, yaitu:

1. **Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.**
2. **Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.**
3. **Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.**
4. **Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.**

Scarborough dan Zimmerer (Ernani Hardiyati, 2011: 8) menyatakan bahwa pemulihan krisis ekonomi berjalan selama tujuh tahun dan beberapa studi telah menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan peranan usaha besar, tetapi UMKM terbukti mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibandingkan dengan usaha skala lebih besar. Tidak mengherankan bahwa baik pada masa krisis dan masa pemulihan perekonomian Indonesia saat ini, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukkan PDB cukup signifikan. Keempat, memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil.

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** menjelaskan bahwa prinsi dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. **Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.**
2. **Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.**
3. **Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
4. **Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**
5. **Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu**

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan stuktur ekonomi perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.**
2. **Menumbuh dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.**
3. **Meningkatkan peran mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan**.

Menurut **Tulus Tambunan (2009:2-4)** usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar yakni sebagai berikut :

1. **Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK).**
2. **Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.**
3. **Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama UMI (Usaha Mikro), di Negara sedang berkembang berlokasi pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.**
4. **UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada di Negara Berkembang, yakni sumber daya alam dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya manusia atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.**
5. **Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda suatu krisis yang besar pada tahun 1997-1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.**
6. **Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi.**
7. **Terbukti pada umumnya, pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat atau dari pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.**
8. **Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menegah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu, bambu, dan rotan.**
9. **Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan prdosuktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.**
10. **Seperti sering dikatakan dalam literature, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap persaingan (UB).**

UMKM tidak saja berbeda dengan UB (Usaha Besar), tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMI (Usaha Mikro) dengan UK (Usaha Kecil) dan UM (Usaha Menengah) dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara yang sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Aspek-aspek ini termasuk orientasi pasar, profil, dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pengusaha. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah :

1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan.